

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan merupakan proses transformasi yang ditandai dengan perubahan struktural yakni perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat (Kiton, 2019). Pembangunan ekonomi menjadi salah satu tolak ukur perkembangan suatu wilayah dalam upaya mencapai kemajuan serta tingkat kesejahteraan yang diharapkan. Menurut Sukirno (2019), pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Secara tradisional pembangunan ekonomi memiliki arti peningkatan yang terus-menerus pada Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Kemudian berkembang pandangan yang lain mengenai definisi pembangunan ekonomi yang lebih menitikberatkan pada peningkatan pendapatan per kapita serta tingkat kemampuan suatu negara dalam mendorong pertumbuhan output yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Menurut Todaro & Smith (2006), tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan pengangguran. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi tidak semata-mata diartikan sebagai peningkatan pertumbuhan ekonomi atau kenaikan pendapatan nasional, tetapi lebih menekankan pada perbaikan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Dalam pembangunan ekonomi terdapat empat faktor yang menjadi modal dalam pembangunan, yaitu sumber daya manusia (adanya ketersediaan tenaga kerja, motivasi, dan pendidikan), sumber daya alam (lahan, tanah, ketersediaan mineral, bahan bakar, dan iklim), pembentukan modal seperti jalan raya dan peningkatan teknologi (pengetahuan, rekayasa, manajemen, dan kewiraswastaan) (Jhinghan, 2016). Sumber daya manusia mencakup ketersediaan tenaga kerja yang memadai, tingkat pendidikan, keterampilan, serta motivasi kerja yang menentukan produktivitas dan kemampuan masyarakat dalam mengelola proses pembangunan. Sumber daya alam merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan produksi dan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal sarana dan prasarana pembangunan berperan penting dalam memperlancar aktivitas ekonomi serta meningkatkan konektivitas antarwilayah. Sementara itu, kemajuan teknologi memungkinkan peningkatan efisiensi produksi, inovasi, serta daya saing ekonomi suatu daerah.

2.1.2 Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola setiap sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2010). Pembangunan daerah tidak hanya bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga menekankan pentingnya pemerataan hasil pembangunan antarwilayah (Nisa et al., 2025). Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah

mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Komponen utama dalam konsep pembangunan ekonomi daerah adalah sebagai berikut (Perdana & Rosi, 2023):

1. Diversifikasi ekonomi. Konsep ini mengacu pada upaya untuk mengembangkan berbagai sektor ekonomi dalam wilayah. Diversifikasi ekonomi dapat mengurangi ketergantungan pada satu sektor tertentu dan menciptakan lapangan kerja baru.
2. Pemberdayaan masyarakat. Pembangunan ekonomi daerah harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat dalam perencanaan. Pemberdayaan masyarakat memungkinkan untuk mengidentifikasi kebutuhan lokal dan berkontribusi dalam merencanakan solusi yang sesuai.
3. Infrastruktur dan aksesibilitas. Pembangunan infrastruktur yang baik, seperti jaringan jalan, transportasi, listrik, dan telekomunikasi, dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas daerah.
4. Pendidikan dan sumber daya manusia. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan merupakan langkah penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Pendidikan yang berkualitas meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memungkinkan inovasi, dan mempersiapkan tenaga kerja yang siap bersaing.

5. Pengembangan sektor unggulan. Setiap daerah memiliki keunggulan komparatif tertentu. Konsep ini berfokus pada pengembangan sektor atau industri yang memiliki potensi unggulan di suatu wilayah.
6. Pengembangan UMKM. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seringkali menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Dukungan terhadap UMKM dapat menciptakan lapangan kerja, merangsang inovasi, dan meningkatkan distribusi pendapatan.
7. Kemitraan dan kerjasama. Kerjasama antara pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional menjadi kunci dalam konsep pembangunan ekonomi daerah. Kemitraan ini dapat mencakup investasi bersama, transfer teknologi, dan pertukaran pengetahuan.
8. Keberlanjutan. Konsep pembangunan ekonomi daerah harus mencakup aspek keberlanjutan jangka panjang. Langkah-langkah yang diambil harus dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu yang panjang tanpa mengorbankan kualitas hidup atau lingkungan.

2.1.3 Ketimpangan Pembangunan Ekonomi

Mubyarto dalam Pratiwi (2021), membedakan ketimpangan menjadi tiga, yaitu 1) ketimpangan antarsektor, yaitu antara sektor industri dengan sektor pertanian; 2) ketimpangan antargolongan ekonomi; dan 3) ketimpangan antarwilayah, terjadi akibat perbedaan sumber daya yang dimiliki. Ketimpangan antarwilayah mencerminkan adanya perbedaan tingkat pembangunan ekonomi antarwilayah. Ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah merupakan

masalah yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan pembangunan ekonomi merujuk pada kondisi tidak meratanya capaian pembangunan antardaerah, yang tercermin dari perbedaan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, serta rendahnya akses terhadap sarana dan prasarana sosial ekonomi. Ketimpangan ini umumnya disebabkan oleh disparitas distribusi sumber daya alam, ketidaksetaraan akses terhadap infrastruktur strategis, serta kesenjangan dalam investasi dan penciptaan lapangan kerja (Sjafrizal, 2008). Perbedaan ini yang membuat tingkat pembangunan di berbagai wilayah dan daerah berbeda-beda, sehingga menimbulkan *gap* atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah (Sukirno, 2019). Oleh karena itu, tidak heran apabila dalam suatu daerah umumnya terdapat daerah maju (*developed region*) dan daerah tertinggal (*underdeveloped region*). Adanya ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah ini selanjutnya berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Implikasi yang ditimbulkan adalah dalam bentuk kecemburuan dan ketidakpuasan masyarakat (Azim et al., 2022).

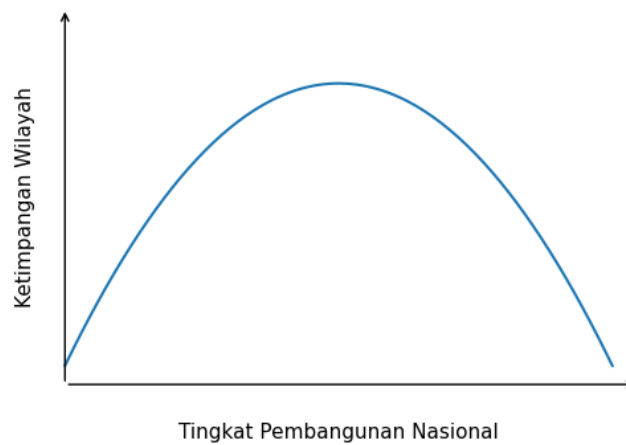
Masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanannya terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada ciri khas (*unique value*) dari daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah) (Arsyad, 2010). Oleh karena itu, penyusunan kebijakan dalam rangka mengurangi ketimpangan harus mempertimbangkan kondisi masing-masing wilayah. Suatu kebijakan yang berdampak pada satu wilayah belum tentu efektif diterapkan di wilayah lainnya. Selain itu, pemerintah daerah harus mengoptimalkan

pengelolaan wilayah administratifnya berdasarkan kebutuhan dan potensi sumber daya yang dimiliki oleh tiap daerah guna mendorong pembangunan yang selaras dengan karakteristik wilayahnya.

2.1.3.1 Teori Ketimpangan

2.1.3.1.1 Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Secara teoritis permasalahan ketimpangan pembangunan antarwilayah mula-mula dimunculkan oleh Douglass C North (1956) dalam analisisnya tentang Teori Pertumbuhan Neo-Klasik. Dalam teori tersebut dimunculkan sebuah prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antarwilayah. Hipotesa ini disebut dengan hipotesa Neo-Klasik. Menurut hipotesa Neo-Klasik, pembangunan ekonomi tidak berlangsung secara merata pada tahap awal. Hal ini dikarenakan mobilitas faktor produksi, baik modal maupun tenaga kerja kurang lancar (M. Hidayat & Rahayu, 2018). Pada fase awal pembangunan, aktivitas ekonomi cenderung terkonsentrasi di wilayah tertentu yang memiliki keunggulan, seperti ketersediaan modal, infrastruktur, teknologi, dan tenaga kerja terampil. Proses tersebut akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Seiring berjalannya waktu, jika pembangunan terus berlanjut, mekanisme pasar akan bekerja melalui mobilitas faktor-faktor produksi. Proses ini akan mendorong pemerataan pembangunan ekonomi antarwilayah. Sehingga secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antarwilayah akan menurun (Sjafrizal dalam Zasriati, 2022). Dengan kata lain kurva ketimpangan pembangunan antarwilayah adalah berbentuk U terbalik.



Sumber: Sjafrizal (2012)

Gambar 2.1
Kurva Ketimpangan Wilayah

Berdasarkan hipotesa Neo-Klasik, tingkat ketimpangan pembangunan antarwilayah umumnya terjadi lebih tinggi di negara berkembang, sedangkan di negara maju ketimpangan cenderung rendah. Pada tahap awal pembangunan di negara maju, wilayah yang memiliki tingkat pembangunan relatif tinggi umumnya lebih mampu memanfaatkan berbagai peluang pembangunan yang ada. Sebaliknya, wilayah yang masih tertinggal sering kali tidak dapat memanfaatkan peluang tersebut secara optimal akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta terbatasnya sarana prasarana pendukung, sehingga pertumbuhan ekonomi cenderung lebih cepat terjadi di wilayah-wilayah yang telah berkembang dibandingkan wilayah yang tertinggal.

Kebenaran hipotesa Neo-Klasik ini kemudian diuji oleh Williamson (1996) melalui penelitian mengenai ketimpangan pembangunan antarwilayah di negara maju dan negara berkembang dengan menggunakan data *time series* dan *cross section*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hipotesa Neo-Klasik terbukti

secara empiris. Temuan ini mengindikasikan bahwa proses pembangunan ekonomi tidak serta-merta menurunkan ketimpangan pembangunan antarwilayah, melainkan pada tahap awal pembangunan justru cenderung meningkatkan ketimpangan sebelum akhirnya menurun pada tahap selanjutnya (Masruri, 2016).

2.1.3.1.2 Teori Sebab-Akibat Kumulatif

Dalam teori yang dikenal sebagai *Cumulative Causation Theory* yang dikemukakan oleh Gunnar Myrdal (1957) dijelaskan bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses sebab menyebabkan sirkuler yang membuat daerah maju mendapat keuntungan semakin banyak dan mereka yang tertinggal di belakang menjadi semakin terhambat. Daerah yang kegiatan ekonominya mengalami ekspansi akan menarik sumber daya (tenaga kerja, modal, barang dan jasa) masuk ke dalamnya. Myrdal menjelaskan bahwa pertumbuhan di suatu wilayah akan menimbulkan dua jenis dampak terhadap wilayah lain, yaitu dampak balik (*backwash effect*) dan dampak sebar (*spread effect*). *Backwash effect* merupakan semua perubahan yang terjadi dan sifatnya merugikan yang disebabkan ekspansi di suatu wilayah, karena sebab-sebab di luar wilayah itu. Sedangkan *spread effect* merupakan implikasi yang terjadi dari momentum pembangunan yang menyebar secara sentrifugal dari pusat daerah ekspansi ekonomi ke wilayah lainnya (Rahman, 2017). Apabila *backwash effect* lebih besar dari *spread effect*, maka dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan regional antarwilayah (Jhinghan, 2016).

Backwash effect muncul ketika berbagai sumber daya, khususnya tenaga kerja dan modal cenderung mengalir menuju pusat pertumbuhan. Tenaga kerja dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang lebih tinggi umumnya memilih

bekerja di daerah yang lebih maju, sehingga daerah tertinggal harus mengandalkan tenaga kerja dengan kualitas dan kapasitas yang relatif rendah. Selain itu, arus modal lebih banyak tertarik ke wilayah yang lebih maju. Meskipun demikian, perkembangan di daerah maju tidak selalu berdampak negatif, karena dalam kondisi tertentu dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal melalui *spread effect*. Pembangunan yang berlangsung di wilayah maju meningkatkan kebutuhan akan sumber daya pada daerah tersebut. Kebutuhan itu dapat dipenuhi oleh daerah tertinggal yang memproduksi sumber daya yang dibutuhkan oleh daerah maju. Dengan demikian, pembangunan pada daerah maju berpotensi memberikan dampak terhadap perkembangan daerah tertinggal.

2.1.3.2 Faktor Penyebab Ketimpangan Pembangunan Ekonomi

Ketimpangan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, melainkan dipengaruhi oleh banyak faktor dan umumnya faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya. Menurut Sjafrizal (2012), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan antarwilayah, sebagai berikut:

1. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah

Ekonomi dari daerah dengan konsentrasi tinggi cenderung tumbuh pesat, sedangkan daerah dengan tingkat konsentrasi ekonomi rendah cenderung mempunyai tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Aktivitas ekonomi akan terpusat pada daerah yang memiliki kandungan sumber daya alam yang melimpah, sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik, serta kondisi demografis dengan kualitas yang baik dan kuantitas yang mencukupi.

2. Alokasi dana pembangunan antarwilayah

Alokasi dana pembangunan dapat bersumber dari pemerintah maupun sektor swasta. Wilayah yang menerima alokasi dana lebih besar umumnya menunjukkan tingkat ketimpangan yang lebih rendah, sedangkan daerah dengan alokasi dana yang terbatas cenderung mengalami ketimpangan pembangunan yang lebih tinggi.

3. Tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antarwilayah

Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal antarwilayah merupakan penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi antarwilayah. Mobilitas barang dan jasa mencakup aktivitas perdagangan serta migrasi antarwilayah. Mobilitas barang dan jasa yang tidak berjalan dengan baik akan mengakibatkan kelebihan produksi yang tidak dapat disalurkan ke wilayah yang membutuhkan. Kondisi ini menyebabkan wilayah yang mengalami kekurangan barang maupun jasa kesulitan dalam mempercepat proses pembangunan daerah.

4. Perbedaan sumber daya alam antarwilayah

Perbedaan ketersediaan sumber daya alam antarwilayah merupakan salah satu faktor yang memicu terjadinya ketimpangan pembangunan. Perbedaan ini berpengaruh langsung terhadap aktivitas produksi di masing-masing daerah. Wilayah yang memiliki sumber daya alam melimpah mampu menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah besar dengan biaya produksi yang lebih rendah, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat. Sebaliknya, daerah dengan sumber daya alam terbatas perlu memakan sedikit biaya yang akan meningkatkan

biaya produksi suatu barang atau jasa yang pada akhirnya melemahkan daya saing dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi lebih lambat.

5. Perbedaan kondisi demografis

Ketimpangan ekonomi antarwilayah disebabkan oleh perbedaan kondisi dalam jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan, disiplin masyarakat, dan etos kerja. Faktor-faktor tersebut berpengaruh langsung terhadap produktivitas tenaga kerja. Wilayah dengan kondisi demografis yang relatif baik umumnya memiliki produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi, sehingga mampu menarik investasi, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, daerah dengan kondisi demografis yang kurang mendukung cenderung mengalami produktivitas tenaga kerja yang rendah.

2.1.3.3 Perhitungan Ketimpangan Pembangunan

2.1.3.3.1 Indeks Williamson

Penentuan ukuran ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah dinamakan Indeks Williamson, dimana penelitian ini dilakukan oleh Jeffrey G. Williamson pada tahun 1966. Indeks ini digunakan oleh Williamson ketika meneliti hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan antardaerah pada negara maju dan negara sedang berkembang. Perhitungan tersebut menggunakan PDRB per kapita dan jumlah penduduk sebagai data dasar. Hasil dari penelitian yang dilakukan Williamson menunjukkan bahwa pada tahap awal pembangunan ketimpangan menjadi lebih besar. Sementara, jika pembangunan dilakukan secara

berkelanjutan ketimpangan pembangunan daerah akan berkurang dengan signifikan. Adapun formulasi dari indeks Williamson adalah sebagai berikut:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y}$$

Dimana:

IW = Indeks Williamson

y_i = PDRB per kapita wilayah i

y = PDRB per kapita seluruh wilayah

f_i = Jumlah penduduk wilayah i

n = Jumlah penduduk seluruh wilayah

Indeks Williamson memiliki nilai antara 0 hingga 1. Jika nilai IW semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan antardaerah semakin rendah, yang berarti pertumbuhan ekonomi relatif merata. Sebaliknya, apabila nilai IW semakin mendekati 1 maka tingkat ketimpangan pembangunan antardaerah semakin tinggi, yang mengindikasikan pertumbuhan ekonomi terjadi secara tidak merata (Sjafrizal, 2008).

2.1.3.3.2 Tipologi Klassen

Tipologi Klassen digunakan sebagai alat analisis yang menggambarkan tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Perhitungan tersebut menggunakan rata-rata pertumbuhan ekonomi setiap daerah dan pendapatan per kapita masyarakat setiap daerah. Klasifikasi daerah menurut

Tipologi Klassen terbagi menjadi empat kelompok daerah, yaitu sebagai berikut (Sjafrizal, 2008):

1. Kuadran I, daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*). Daerah dalam kuadran ini menunjukkan ekonomi yang baik dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Daerah ini biasanya menjadi pusat ekonomi dan memiliki infrastruktur yang berkembang dengan baik.
2. Kuadran II: daerah berkembang cepat (*high growth but low income*). Daerah dalam kuadran ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi pendapatan per kapita masih relatif rendah. Daerah ini memiliki potensi untuk dikembangkan, namun pemanfaatannya belum dilakukan secara optimal. Daerah ini dapat berkembang lebih lanjut dengan investasi dan kebijakan yang mendukung peningkatan kesejahteraan.
3. Kuadran III, daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*). Daerah dalam kuadran ini memiliki pendapatan per kapita yang tinggi tetapi pertumbuhan ekonominya rendah. Daerah ini termasuk wilayah maju, namun mengalami perlambatan pertumbuhan akibat dari melemahnya aktivitas ekonomi utama. Wilayah ini perlu fokus pada strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih dinamis.
4. Kuadran IV: daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*). Daerah dalam kuadran ini memiliki pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang rendah. Daerah ini mengalami berbagai permasalahan struktural sehingga menjadi wilayah yang tertinggal. Diperlukan intervensi kebijakan

yang signifikan untuk memperbaiki situasi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini.

2.1.4 Dana Alokasi Umum

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antardaerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada pemerintah daerah setiap satu tahun sekali sebagai dana yang digunakan untuk daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut (Alfurqani et al., 2021). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, total DAU secara keseluruhan minimal 26% dari pendapatan bersih dalam negeri di APBN. Adapun yang dimaksud dengan pendapatan dalam negeri bersih APBN adalah penerimaan pendapatan (pajak dan bukan pajak) dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada pemerintah daerah. Ketentuan tersebut secara tidak langsung mendorong pemerintah untuk mendistribusikan anggaran sesuai dengan kebutuhan daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara merata.

DAU dialokasikan dalam bentuk *block grant*, yaitu penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah. DAU dialokasikan kepada daerah berdasarkan potensi ekonomi dan kebutuhan belanja daerah masing-masing. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan kapasitas fiskal daerah (*fiscal capacity*). Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 55 tahun 2005,

kebutuhan daerah dicerminkan dari luas daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk, tingkat kesehatan, kesejahteraan, dan pendapatan masyarakat di daerah. Sedangkan kapasitas fiskal dicerminkan dari penerimaan/pendapatan daerah. Oleh karena itu, daerah yang potensinya besar namun kebutuhannya relatif kecil akan memperoleh alokasi yang sedikit. Sebaliknya, daerah yang potensinya kecil, namun kebutuhannya besar akan memperoleh alokasi DAU besar, dan seterusnya.

2.1.4.1 Teori Federalisme Fiskal

Teori Federalisme Fiskal merupakan teori yang dikembangkan oleh Hayek, Musgrave, dan Oates. Teori ini menggambarkan tentang hubungan antara desentralisasi dengan perekonomian, pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat. Teori ini beranggapan adanya keterbatasan informasi terkait kebutuhan dan biaya setiap daerah mendorong pemerintah pusat cenderung menghasilkan output yang sama untuk tiap wilayah yang menyebabkan kesejahteraan tidak tercapai karena tuntutan dari penduduk yang berbeda. Dalam teori ini ditekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan jalan desentralisasi yaitu pendelegasian wewenang oleh pusat kepada daerah untuk mengatur daerahnya sendiri atau sering disebut dengan otonomi daerah. Desentralisasi fiskal yang diterapkan oleh pemerintah pusat membuat pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk mengelola keuangan daerahnya. Desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik (Kresnandra, 2016). Menurut Oates (1999) kesejahteraan ekonomi dapat dicapai ketika output barang dan jasa disediakan oleh

tingkat pemerintahan terendah dianggap lebih mengetahui refensi lokal, lebih dekat dengan penduduk, dan lebih memahami kondisi daerahnya daripada pemerintah pusat (Agatha & Uliansyah, 2021).

2.1.4.2 Perhitungan Dana Alokasi Umum

DAU dialokasikan kepada daerah dengan menggunakan formula DAU berdasarkan alokasi dasar dan celah fiskal, dengan proporsi pembagian DAU untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing sebesar 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen) dari besaran DAU secara nasional. Formula DAU dirumuskan sebagai berikut

$$\text{DAU} = \text{AD} + \text{CF}$$

Dimana:

DAU = alokasi DAU per daerah

AD = alokasi DAU berdasar alokasi dasar

CF = alokasi DAU berdasar celah fiskal

Alokasi dasar dihitung berdasarkan data jumlah Pegawai Negeri Sipil Negeri Daerah (PNSD) dan besaran gaji PNSD dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan lain terkait dengan penggajian. Sementara celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal merupakan kebutuhan pendanaan daerah dalam rangka melaksanakan fungsi layanan dasar umum yang diukur melalui jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan kontruksi, indeks pembangunan manusia, dan PDRB per kapita. Sedangkan

kapasitas fiskal merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD, DBH SDA, DBH pajak, termasuk cukai hasil tembakau.

DAU pada hakikatnya disusun oleh pemerintah (Kementrian Keuangan/DJPK, BKF, dan DJA) serta DPR. Adapun sumber data dalam perhitungan besaran DAU adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan perpajakan
2. Penerimaan negara bukan pajak
3. Dana bagi hasil
4. Subsidi pajak
5. Subsidi BBM
6. Subsidi pupuk

2.1.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun keatas). Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. TPAK merupakan indikator penting yang menggambarkan proporsi penduduk usia kerja yang berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. TPAK digunakan untuk mengukur tingkat keterlibatan penduduk dalam angkatan kerja, sehingga dapat menggambarkan secara jelas sejauh mana penduduk usia kerja berperan aktif maupun tidak aktif dalam bekerja.

Menurut Solow, pertumbuhan ekonomi tergantung dari bertambahnya penyediaan faktor-faktor produksi seperti penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal serta ditambah dengan tingkat kemajuan teknologi. Teori ini mengembangkan tentang rasio modal output yang berubah-ubah. Dimana untuk dapat menghasilkan sejumlah output tertentu dapat menggunakan kombinasi modal dan tenaga kerja yang berbeda-beda (Arsyad, 2010). Menurut Becker (1993), modal manusia (*human capital*) adalah salah satu faktor penting dalam proses pembangunan ekonomi. Dengan adanya modal manusia yang berkualitas, maka kinerja ekonomi diyakini akan lebih baik. Tingkat pembangunan manusia yang baik akan mempengaruhi perekonomian melalui peningkatan keterampilan penduduk yang berdampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja. Kualitas penduduk dan tenaga kerja yang baik maka akan menghasilkan angkatan kerja yang bermutu. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi (Todaro dalam Kiton, 2019). Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

2.1.5.1 Jenis-Jenis Angkatan Kerja

Menurut Badan Pusat Statistik (2018), penduduk angkatan kerja dapat dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu:

1. Bekerja

Golongan bekerja yaitu orang yang melakukan suatu kegiatan dengan maksud untuk memperoleh penghasilan atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan. Diantara kelompok yang bekerja, terdapat dua kategori, yakni mereka yang aktif bekerja dan mereka yang sementara tidak bekerja. Seseorang yang termasuk dalam kategori sementara tidak bekerja, yaitu seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja karena berbagai sebab.

Berdasarkan jumlah jam kerja selama seminggu, golongan aktif yang bekerja dibedakan menjadi dua golongan:

- a. Pekerja penuh, yaitu pekerja yang bekerja selama minimal 35 jam selama seminggu.
- b. Pekerja tidak penuh, yaitu pekerja yang bekerja di bawah jam kerja normal atau kurang dari 35 jam seminggu.

2. Pengangguran

Golongan pengangguran yaitu orang yang belum memiliki pekerjaan atau seseorang yang ingin bekerja dan/atau memiliki kemampuan bekerja tetapi tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Adapun yang termasuk dalam kategori ini yaitu orang yang belum pernah bekerja, mereka yang sudah bekerja/diberhentikan, dan mereka yang sedang berusaha mencari kerja.

2.1.5.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Beberapa faktor yang mempengaruhi naik turunnya tingkat partisipasi angkatan kerja, sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk yang bersekolah

Jika jumlah penduduk yang melanjutkan pendidikan semakin bertambah, maka jumlah angkatan kerja akan berkurang sehingga tingkat partisipasi angkatan kerja cenderung mengalami penurunan. Banyaknya penduduk yang menempuh pendidikan tersebut dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas pendidikan serta pendapatan yang dihasilkan oleh keluarga.

2. Jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga

Semakin banyak anggota keluarga yang memilih untuk menjadi pengurus rumah tangga, maka tingkat partisipasi angkatan kerja cenderung akan semakin rendah.

3. Tingkat umur

Penduduk usia muda umumnya belum memiliki tanggung jawab yang besar sebagai pencari nafkah untuk keluarga, sehingga lebih memilih untuk melanjutkan pendidikan. Sebaliknya, penduduk berusia 25-55 tahun, memiliki tanggung jawab sebagai pencari nafkah sehingga partisipasi angkatan kerja pada umur tersebut relatif tinggi. Sementara penduduk yang berusia diatas 55 tahun cenderung mengalami penurunan produktivitas, sehingga tingkat partisipasi angkatan kerjanya rendah.

4. Tingkat upah

Semakin tinggi upah yang diterima oleh masyarakat, maka semakin besar minat masyarakat untuk berpartisipasi di pasar kerja, sehingga akan meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja.

5. Tingkat pendidikan

Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin besar kecenderungannya untuk bekerja, sehingga tingkat partisipasi angkatan kerja menjadi relatif lebih tinggi.

6. Kegiatan ekonomi

Pelaksanaan program pembangunan menciptakan peluang kerja baru karena memerlukan keterlibatan tenaga kerja, sehingga dapat mendorong peningkatan partisipasi angkatan kerja.

2.1.5.3 Perhitungan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Untuk mengetahui tingkat partisipasi angkatan kerja, dihitung berdasarkan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Adapun rumusnya sebagai berikut:

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$$

Dari rumus tersebut menunjukkan bahwa semakin besar tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan dampak dari meningkatnya jumlah angkatan kerja. Sebaliknya apabila semakin banyak jumlah penduduk yang tidak termasuk dalam

angkatan kerja maka akan semakin sedikit jumlah angkatan kerja yang berdampak pada mengecilnya angka TPAK.

2.1.6 Sektor Pertambangan dan Penggalian

Sumber daya alam adalah segala kekayaan alam yang terdapat di permukaan bumi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia (Irham et al., 2024). Sumber daya alam merupakan faktor produksi untuk menghasilkan sesuatu. Secara sederhana, sumber daya alam didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berada di alam yang dapat dimanfaatkan manusia berupa potensi nilai dari bahan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut pandangan Adam Smith, sumber daya alam merupakan komponen penting dalam menciptakan kekayaan dan memperluas peluang ekonomi (Faisal Anwar et al., 2024).

Sumber daya alam dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber daya yang dapat diperbaharui atau tidak akan pernah habis, dan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui atau yang jumlahnya terbatas. Sektor pertambangan dan penggalian termasuk dalam sektor primer yang mengekstraksi sumber daya alam. Menurut Badan Pusat Statistik (2017), komoditi yang dicakup dalam kategori pertambangan dan penggalian dikelompokkan dalam empat golongan pokok, yaitu pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam, serta pertambangan dan penggalian lainnya. Menurut Undang-Undang No. 4 tahun 2009, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Sektor pertambangan dan penggalian

berperan sebagai penyedia sumber energi yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sektor ini memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, serta pendapatan daerah.

Berdasarkan informasi yang tercatat dalam Peraturan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, kategori pertambangan yang ada di Indonesia, meliputi:

1. Minyak bumi, merupakan hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur.
2. Batu bara, merupakan hasil alam dari endapan organik yang telah berusia lebih dari ratusan tahun.
3. Biji besi, merupakan endapan logam yang terbentuk karena proses kimia dan fisika.
4. Emas, merupakan logam mulia yang memiliki sifat lunak, mudah dibentuk, mampu menghantarkan listrik, dan memiliki kemampuan memantulkan cahaya.
5. Tembaga, merupakan salah satu logam yang dapat menghantarkan listrik dan penghantar panas yang baik.

2.1.6.1 Teori Kutukan Sumber Daya Alam

Keberadaan sumber daya alam yang melimpah memberikan dampak besar bagi perekonomian suatu negara. Sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan korelasi positif yang berarti bahwa semakin banyak sumber daya alam dapat meningkatkan kemakmuran ekonomi. Namun kenyataannya, negara

yang berlimpah sumber daya alam justru menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dibandingkan negara dengan sumber daya alam yang relatif rendah (Amalia & Emalia, 2022). Sejumlah penelitian terdahulu menyatakan bahwa ketergantungan yang besar terhadap sumber daya alam yang tidak dikelola dengan tepat sering kali berkontribusi terhadap ketidakberhasilan pembangunan dan menyebabkan terjadinya fenomena *Natural Resource Curse* (NRC). Istilah NRC secara resmi pertama kali ditemukan oleh Auty (1993), yang dalam penelitiannya menemukan bahwa negara-negara yang kaya akan sumber daya alam tidak mampu memanfaatkan sumber daya alam untuk mendorong perekonomian, sehingga negara-negara tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dibandingkan negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang lebih sedikit. Auty berpendapat bahwa negara yang bergantung pada sumber daya alam berusaha mengembangkan industri yang menguntungkan namun menghadapi masalah untuk meningkatkan perekonomian. Negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, secara rata-rata tumbuh lebih lambat, tidak berhasil mencapai kemajuan pembangunan ekonomi, dan menghadapi tingkat kemiskinan yang lebih tinggi (Rahma et al., 2021). Sebuah daerah dapat dikatakan mengalami fenomena NRC ketika daerah tersebut menggantungkan perekonomiannya pada SDA, tetapi tidak berhasil menciptakan pembangunan daerah dan kesejahteraan yang tinggi bagi penduduknya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul/Penulis	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Mario Andrias Kiton. 2019.	Variabel: Ketimpangan pembangunan, angkatan kerja, dana perimbangan Metode: Indeks Williamson, Regresi data panel	Variabel: Investasi, aglomerasi	Investasi berpengaruh negatif signifikan, angkatan kerja dan aglomerasi berpengaruh negatif tidak signifikan, sementara dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pembangunan.	<i>Jurnal Ilmiah Smart</i> , 3(2).
2.	Analisis Ketimpangan Pembangunan Antarkabupaten/ Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2017. Hendry Alfiansyah dan Budyanra. 2019.	Variabel: Ketimpangan pembangunan, DAU, TPT Metode: Regresi data panel	Variabel: Angka melek huruf, belanja modal, PAD Metode: Indeks Jaime Bonet	Belanja modal, PAD, dan TPT berpengaruh positif signifikan, sementara angka melek huruf dan DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pembangunan.	<i>Seminar Nasional Official Statistics</i> , 2019(1).
3.	Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, Dana Perimbangan, dan Aglomerasi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah di Provinsi Banten Tahun 2011-2020. Galuh	Variabel: Ketimpangan pembangunan, dana perimbangan Metode: Regresi data panel	Variabel: PMA, PMDN, aglomerasi	Dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan, PMDN berpengaruh positif signifikan, PMA berpengaruh negatif tidak signifikan, dan aglomerasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan.	<i>Diponegoro Journal of Economics</i> , 12(2).

Gita Lestari dan Mulyo Hendro Robertus. 2023.					
4.	Pemicu Ketimpangan Pendapatan di Regional Kalimantan Tahun 2015-2020. Laili Nurhasanah. Muzdalifah. 2024.	Variabel: Ketimpangan pendapatan, sektor pertambangan Metode: Regresi data panel	Variabel: pertumbuhan ekonomi, sektor pertanian, pendidikan	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan, sementara sektor pertambangan berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan.	<i>Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan</i> , 7(1).
5.	Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Jambi. Wanti Oktaviani dan Zulgani Rosmeli. 2017.	Variabel: Ketimpangan pembangunan, DAU Metode: Indeks Williamson	Variabel: DAK, DBH Metode: <i>Path analysis</i>	DBH berpengaruh positif signifikan, sedangkan DAU dan DAK berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan.	<i>E-Journal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah</i> , 6(3).
6.	Analisis Pengaruh Populasi, Pertumbuhan Ekonomi, TPAK, dan IPM Terhadap Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Barlingmascake b 2013-2019. Bustam Anggun Pamiati dan Nenik Woyanti. 2021.	Variabel: Ketimpangan pembangunan, TPAK Metode: Indeks Williamson, Tipologi Klassen, Regresi data panel	Variabel: Jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, IPM	Jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan, pertumbuhan ekonomi dan TPAK berpengaruh negatif tidak signifikan, sedangkan IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pembangunan.	<i>BISECER (Business Economic Entrepreneurship)</i> , 4(1).
7.	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, dan Investasi Terhadap Ketimpangan	Variabel: Ketimpangan pembangunan, DAU	Variabel: Belanja modal, investasi	DAU berpengaruh negatif signifikan, belanja modal berpengaruh positif tidak signifikan, dan investasi	<i>Economics, Accounting and Business Journal</i> , 1(1).

	Pembangunan Antarkabupaten/kota di Provinsi Riau. Zul Hazmi Alfurqani, Dwi Widiarsih, Jeki Algusri. 2021.	Metode: Indeks Williamson, Regresi data panel		berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan.	
8.	Ketimpangan Ekonomi Antar Provinsi di Sumatera. Yeniwati. 2013.	Variabel: Ketimpangan ekonomi, sumber daya alam Metode: Indeks Williamson, Regresi data panel	Variabel: Investasi, aglomerasi,	Investasi dan sumber daya alam berpengaruh negatif signifikan, sementara aglomerasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan ekonomi.	<i>Jurnal Kajian Ekonomi</i> , 2(3).
9.	Analisis Ketimpangan Wilayah Antar Kabupaten/Kota dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi di Provinsi Jawa Timur 2010-2014. Gantara Hadi Noto. 2016.	Variabel: Ketimpangan pembangunan, angkatan kerja Metode: Regresi data panel	Variabel: UMR, IPM, pengeluaran pemerintah	UMR, angkatan kerja berpengaruh positif signifikan, sementara IPM dan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan wilayah.	<i>Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB</i> , 4(2).
10.	Analisis Ketimpangan Pembangunan Daerah di 34 Provinsi Indonesia. Cholly Fatun Nisa, Arivina Ratih Yuliahar Ther, Prayudha Ananta, I Wayan Suparta. 2025.	Variabel: Ketimpangan pembangunan, dana perimbangan, TPAK Metode: Regresi data panel	Variabel: <i>Foreign direct investment</i> (FDI) Metode: Indeks Jaime Bonet	Dana perimbangan dan FDI berpengaruh negatif signifikan, sedangkan TPAK berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan.	<i>E-Journal Field of Economics, Business, and Entrepreneurship (EFEBE)</i> , 3(2).
11.	Determinan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa	Variabel: Ketimpangan Pendapatan, DAU	Variabel: DAK, PAD,	PAD dan DAK berpengaruh negatif signifikan, sementara DAU	<i>Jurnal Edukasi Ekonomi, Pendidikan,</i>

	Barat. Harun Nur Jamiel, Nurul Anwar, Agus Arifin, Rini Agustis Eka Yanti, Ilah. 2022.	Metode: Regresi data panel		berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan.	<i>dan Akuntasnsi 10(2).</i>
12.	Pengaruh Kekayaan Sumberdaya Alam Batubara Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur. Ahmad Zaini. 2017.	Variabel: Ketimpangan pendapatan, sektor pertambangan (sub-sektor batu bara) Metode: Regresi data panel	Variabel: Pengeluaran bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, PDRB per kapita, sektor pertanian	Sektor batu bara berpengaruh positif signifikan, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur berpengaruh positif signifikan, sementara PDRB per kapita dan sektor pertanian tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.	<i>Jurnal Borneo Administrat or 13(2).</i>
13.	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, dan TPAK Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Muhammad Luthpi Azhar, M. Rusmin Nuryadin. 2025.	Variabel: Ketimpangan pendapatan, TPAK Metode: Regresi data panel	Variabel: pertumbuhan ekonomi, IPM	IPM berpengaruh negatif signifikan, TPAK berpengaruh positif signifikan, sementara pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.	<i>JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangun an 8(1).</i>
14.	Analisis Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Kedungsepur. Khoir Akfini Didia. 2016	Variabel: Ketimpangan pembangunan, TPAK Metode: Regresi	Variabel: Investasi, IPM, PDRB per kapita, jumlah penduduk	Investasi berpengaruh negatif signifikan, IPM berpengaruh positif signifikan, TPAK berpengaruh positif tidak	<i>Economic Developmen t Analysis Journal 5 (1).</i>

		data panel		signifikan, dan jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pembangunan.	
15.	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, TPAK, dan Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014. Masruri. 2016.	Variabel: Ketimpangan pendapatan, TPAK Metode: Regresi data panel	Variabel: Pertumbuhan ekonomi, IPM, TPT	Pertumbuhan ekonomi, IPM, dan TPT berpengaruh positif signifikan, sementara TPAK berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.	<i>Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB 5(1).</i>

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan beragam aspek yang sudah diidentifikasi. Berikut merupakan kerangka pemikiran dalam penelitian ini.

2.3.1 Hubungan Antara Dana Alokasi Umum Dengan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi

Dana pembangunan (investasi pemerintah dan swasta) menjadi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketimpangan pembangunan antrawilayah (Sjafrizal dalam Lestari & Robertus, 2023). Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki peran strategis sebagai instrumen pemerataan fiskal antardaerah. Perbedaan kapasitas fiskal yang signifikan antardaerah berpotensi menciptakan kesenjangan

dalam kemampuan pembiayaan pembangunan. Melalui DAU pemerintah pusat berupaya untuk mengatasi kesenjangan tersebut, dengan memberikan tambahan dana bagi daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah. Peningkatan DAU memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja publik, khususnya pada sektor-sektor yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Peningkatan kualitas pelayanan publik diharapkan mampu mempercepat pembangunan di daerah tertinggal, sehingga kesenjangan pembangunan antarwilayah dapat ditekan.

Penelitian yang dilakukan oleh Alfurqani et al. (2021) serta Alfiansyah & Budyanra (2019) menyatakan bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi. Semakin besar DAU yang diterima oleh suatu daerah, maka ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah cenderung menurun. Namun, hasil ini berbeda dengan temuan oleh Jamiel et al. (2022) dan Oktaviani et al. (2017), yang menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap ketimpangan.

2.3.2 Hubungan Antara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Dengan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan sejauh mana suatu daerah mampu melibatkan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi yang bersifat produktif. Menurut Sjafrizal (2012), faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan antarwilayah salah satunya adalah perbedaan demografis, yang meliputi struktur kependudukan dan perbedaan kondisi ketenagakerjaan, yang termasuk didalamnya adalah angkatan kerja. Menurut

Todaro dan Smith dalam Nisa et al. (2025), peningkatan partisipasi angkatan kerja, terutama dari kelompok muda, dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah dengan memperluas basis tenaga kerja dan meningkatkan daya saing ekonomi. Perbedaan TPAK antarwilayah menunjukkan adanya perbedaan kesempatan kerja dan struktur ekonomi wilayah. Daerah dengan TPAK tinggi menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi mampu melibatkan sebagian besar penduduk usia kerja dalam aktivitas produktif. Sebaliknya, rendahnya TPAK mengindikasikan adanya hambatan struktural dalam pasar tenaga kerja, seperti keterbatasan lapangan kerja atau rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar ketimpangan dengan daerah lain yang lebih maju.

Penelitian oleh Pamiati & Woyanti (2021) serta Nisa et al. (2025) menemukan bahwa TPAK berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi. Semakin tinggi TPAK suatu daerah, maka ketimpangan pembangunan antarwilayah cenderung akan menurun. Namun, hasil ini berbeda dengan temuan oleh Didia (2016), Azhar & Nuryadin (2025), serta Masruri (2016) yang menunjukkan bahwa TPAK berpengaruh positif terhadap ketimpangan.

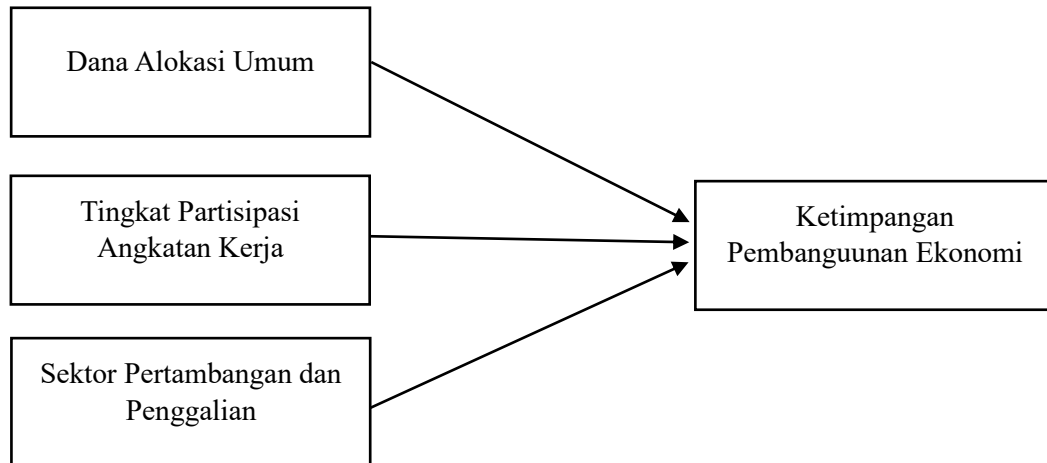
2.3.3 Hubungan Antara Sektor Pertambangan dan Penggalan Dengan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi

Sektor pertambangan dan penggalan memiliki peran penting dalam pembentukan struktur ekonomi daerah, khususnya di wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Sektor ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya, karena sangat bergantung pada ketersediaan

sumber daya alam yang bersifat tidak terbarukan. Konsentrasi tersebut membuat pertumbuhan ekonomi lebih cepat berkembang di wilayah tambang dibandingkan wilayah lain. Akibatnya, terjadi perbedaan kemampuan antarwilayah dalam menikmati hasil pembangunan, baik dari sisi pendapatan, kesempatan kerja, maupun akses infrastruktur. Daerah dengan kontribusi sektor pertambangan yang besar dapat mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi tanpa diikuti dengan tingkat kesejahteraan yang merata. Kondisi ini dapat mendorong terjadinya ketimpangan antarwilayah. Fenomena ini selaras dengan konsep *Natural Resource Curse* oleh Auty (1993), yaitu kondisi ketika kelimpahan sumber daya alam justru tidak menghasilkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah & Muzdalifah (2024) serta Zaini (2017), menunjukkan bahwa sektor pertambangan berpengaruh positif terhadap ketimpangan. Peningkatan sektor pertambangan dalam perekonomian cenderung memperbesar ketimpangan. Namun, temuan oleh Yeniwati (2013), menunjukkan bahwa sumber daya alam termasuk pertambangan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan ekonomi.

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah disajikan tersebut, maka hipotesis yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Diduga dana alokasi umum dan tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif, sementara sektor pertambangan dan penggalian berpengaruh positif secara parsial terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah di Pulau Kalimantan tahun 2018-2024.
2. Diduga dana alokasi umum, tingkat partisipasi angkatan kerja, sektor pertambangan dan penggalian berpengaruh secara simultan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah di Pulau Kalimantan tahun 2018-2024.